

## DAFTAR REFERENSI

- Alatas, S. H. 1987. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Anwar, Syamsul. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Asis, De. 2006. *Reducing Corruption at the Local Level*. Washington: World Bank Institute.
- Bahrin. 2004. *Dampak Korupsi Terhadap Kehancuran Negara dan Upaya Penanggulangannya*. Institut Pertanian Bogor.
- Cressey, Donald R. 1953. *Other people's money, dalam: "The Internal Auditor as Fraud Buster, Hillison, Willim. Et. Al. 1999"*. Managerial Auditing Journal, MCB University Press. Volume 14 Number 7 page 351-362.
- Ebimobowei dan Binaebi. 2013. *An Examination of the Effectiveness of Auditing of Local Government Financial Reports in Bayelsa State, Nigeria*. Current Research Journal of Social Sciences 5(2): 45-53, 2013.
- Erika, Revida. 2003. *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Solusinya*. Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
- Haning, J. 2005. *Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Otonom: "Langkah apa yang dapat diambil?"*. Kupang.
- Heriningsih dan Marita. 2013. *Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi*

- Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa*). Buletin Ekonomi, 11(1).
- Heriningsih, Sucahyo. 2015. *Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis dari Opini Auditor*. Univesity Research Colloquium 2015, 86-95.
- Hustead, Bryan W. 2002. "Culture and International Anti Corruption Agreemants in Latin America", *Journal of Business Ethics*, 37 (4) : 413-422.
- Indonesia Corruption Watch. 2016. *Laporan Tren Korupsi Semester I 2016*.
- Ismunawan. 2016. *Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- Khan, M. A. 2006. *Role of audit in fighting corruption. Ad Hoc Group Meeting on "Ethics, Integrity, and Accountability in the Public Sector: Rebuilding Public Trust in Government through the Implementation of the UN Convention against Corruption*. St. Petersburg, Russia.
- Klitgaard, Robert. 2002. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kompas.com. 2017. Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah (<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/06121891/sri-mulyani--indonesia-peringkat-pertama-tingkat-kepercayaan-masyarakat>) (diakses tanggal 23 September 2017).
- Lane, Jan-Erik. 2003. *Management and public organization: The principal-agent framework*. Working paper. University of Geneva and National University of Singapore.
- Liu, Jin dan Bin Lin. 2012. *Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data*. *China Journal of Accounting Research* 5 (2012) 163–186.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : suatu sarana good governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1 , Hal 1-17.
- Masyitoh, Wardhani dan Setyaningrum. 2015. *Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan.
- McMullan, M. 1961. *A THEORY OF CORRUPTION Based on a Consideration of Corruption in the Public Services and Governments of British Colonies and ex Colonies in West Africa*. The Sociological Review Volume 9, Issue 2 July 1961 Pages 181–201.
- Modugu, Ohonba dan Izedonmi. 2012. *Challenges of Auditors and Audit Reporting in a Corrupt Environment*. Research Journal of Finance and Accounting Vol 3, No 5, 2012.
- Moe, T. M. 1984. *The New Economics of Organization*. American Journal of Political Science 28(5): 739:777.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Nas, Tevfik F., Albert C. Price, and Charles T. Weber. 1986. "A Policy-Oriented Theory of Corruption,". The American Political Science Review (80): 107-119.
- Otalor dan Eiya. 2013. *Combating Corruption in Nigeria: The Role of the Public Sector Auditor*. Research Journal of Finance and Accounting Vol 4, No 4, 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat.

- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta; Kerjasama antara Transparency Internastional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Pranataningrum, R. A. 2012. *Pengaruh Aspek Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2008-2010*. Skripsi Sarjana. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Putri, Nabila. 2016. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Survei pada Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung)*. Universitas Widyatama, Bandung.
- Rini dan Damiati. 2017. *Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4(1), 2017, pp 73-90.
- Rini dan Sarah, A. (2014). *Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Etikanomi*, (Vol. 13).
- Robertson. 2002. *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Pertama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rustiarini dan Sunarsih. 2015. *Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Sadjiarto, A. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 2 Nomor 2, 138–150.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Terj. Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Wahyu. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi Pemerintah daerah di Indonesia*. Skripsi. Undip.
- Setyawati, Emilyya Dwi. 2017. *Pengaruh Tingkat Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Thesis. UPN Veteran Yogyakarta.
- Shah, Anwar (Editor). 2007. *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Rahardjo, Shiddiq Nur. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah*



*Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, Nomor 4, September 2013, Halaman 1-13 ISSN: 2337-3806.

Tanzi, Vito dan Hamid Davoodi. 2002. *Corruption, public investment, and growth, dalam Abed, George T. dan Sanjeev Gupta (eds.). 2002. Governance, Corruption, dan Economic Performance*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Tuanakotta, Theodorus. 2007. "Akuntansi Forensik & Audit Investigatif". Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wakhyudi. 2011. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Ciawi: Pusdiklatwas BPKP.

Widjajabrata, Safaat and Nicholas M Zacchea. 2004. *International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle Corruption*. The Journal of Government Financial Management, Vol. 53, No. 3.

